



**DEPARTEMEN TEKNIK GEOMATIKA**  
**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK GEOMATIKA**  
**SILABUS MATA KULIAH**

<b>MATA KULIAH</b>	Nama MK	Hukum Laut
	Kode MK	CM234980
	SKS	2 (dua)
	Semester	Pilihan

**DESKRIPSI MATA KULIAH**

Kuliah ini akan memperkenalkan para mahasiswa pada hukum internasional tentang laut. Menciptakan tata kelola yang efektif dan peraturan untuk lautan terus menjadi tantangan bagi masyarakat internasional. Rezim lautan saat ini dibangun di atas Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS). Konvensi kerangka kerja ini membagi lautan di berbagai zona maritim negara pantai dan wilayah internasional seperti perairan darat, laut teritorial, zona contiguous, zona eksklusif ekonomi, landas kontinen dan perairan kepulauan. Dalam semua bidang ini rezim hukum berupaya menjaga keseimbangan antara hak, kepentingan, dan kewajiban masing-masing negara dan kepentingan masyarakat internasional. Tinjauan singkat tentang sejarah hukum laut akan diberikan, dan kodifikasinya dalam hukum internasional. Setelah kuliah pengantar, masalah-masalah inti tertentu dari hukum laut akan diperiksa secara lebih rinci. Kuliah ini juga akan melihat zona maritim, luasnya, rezim substantif (termasuk hak-hak Negara ketiga), dan penetapan batas maritim jika terjadi klaim yang tumpang tindih. Kuliah ini juga akan memperkenalkan mahasiswa pada hukum nasional laut (UU No. 23/2014 dan Permendagri No. 171/2017). Aturan-aturan ini mengatur batas-batas dan wewenang pengelolaan wilayah laut Indonesia antara provinsi, kota, kabupaten. Aturan-aturan ini juga mengatur wilayah kepulauan.

**CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN**

<b>C</b>	Mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan pada bidang geodesi, surveying, hidrografi, penginderaan jauh, fotogrametri, dan kadaster.
<b>F</b>	Mampu menyusun laporan ilmiah dan memberikan solusi berdasarkan kepemimpinan, kreativitas dan keterampilan komunikasi serta bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan.
<b>H</b>	Mampu bekerja dalam tim lintas disiplin dan lintas budaya sehingga dapat bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
<b>I</b>	Mampu bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi etika profesi dalam menyelesaikan permasalahan teknik di bidang geodesi, surveying, hidrografi, penginderaan jauh, fotogrametri, sistem informasi geografis, dan kadaster.

**CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH**

1	Mahasiswa mampu memahami definisi dan konsep hukum laut nasional dan internasional
2	Mahasiswa mampu memahami peraturan yang berlaku yang terkait dengan batas laut nasional dan internasional
3	Mahasiswa mampu menentukan garis pangkal yang digunakan untuk acuan batas laut nasional dan internasional
4	Mahasiswa mampu menentukan batas laut antar negara yang bersebelahan dan berhadapan
5	Mahasiswa mampu menentukan batas laut antar propinsi, kabupaten dan kota dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia

**BAHAN KAJIAN**

1	Definisi dan sejarah hukum laut nasional dan internasional
2	Definisi dan jenis-jenis garis pangkal
3	Batas zona maritim internasional: perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, landas kontinen dan perairan kepulauan menurut UNCLOS 1982
4	Batas zona pengelolaan wilayah laut propinsi, kabupaten dan kota menurut UU No, 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 171 Tahun 2017

**PRASYARAT**

Survei Hidrografi

**BAHAN PUSTAKA**

- |    |   |
|----|---|
| A. | Utama<br>United Nations Convention on the Law of the Sea 1982<br>UU No. 23 Tahun 2014<br>Permendagri No 171 Tahun 2017  |
| B. | Pendukung<br>Kusumaatmadja, M., 1978. Bungai Rampai Hukum Laut. Jakarta: Penerbit Binacipta.<br>IHO., 2006. A Manual on Technical Aspects of the UNCLOS 1982. SP No. 51 IHO |